

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap transparansi dalam tata kelola keuangan desa di Desa Kerirea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun anggaran 2016 secara umum dapat di simpulkan bahwa kurang transparansi. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kesimpulan dari aspek berikut:

1. Transparansi pada tahap perencanaan

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran serta tidak adanya media informasi di desa yang bisa di akses oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Kerirea dan hasil observasi di kantor desa yang menunjukkan bahwa tidak ada papan informasi atau media informasi di kantor desa dan tempat lain.

2. Transparansi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa kurang transparan atau terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan serta informasi mengenai administrasi dan pembelanjaan ataupun tidak menyediakan sarana informasi yang bisa di akses oleh masyarakat, tetapi dalam pelaksanaan keterlibatan masyarakat sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Kerirea dan hasil observasi penulis menunjukkan bahwa

tidak adanya papan informasi mengenai proyek pembangunan yang ditempel pada setiap tempat pelaksanaan pembangunan.

3. Transparansi pada tahap penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan masyarakat tidak pernah bertanya terkait dengan pengelolaan anggaran pelaksanaan kegiatan di Desa Kerirea serta pemerintah desa yang belum terbuka dalam memberi informasi terkait dengan dokumen – dokumen pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa dan aparat desa.

4. Transparansi pada tahap pelaporan

Dalam tahap pelaporan pemerintah desa melakukan laporan pada pertengahan tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran serta sering ada keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan aparat Desa Kerirea belum mahir dalam mengoperasikan komputer dan ada nota klarifikasi yang diberikan pemerintah desa kepada BPD namun tidak pernah ada klarifikasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa kerirea dan aparat desa.

5. Transparansi pada tahap pertanggungjawaban.

Dalam tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Kerirea kurang transparan. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban di sampaikan secara langsung kepada masyarakat dan BPD tetapi tidak disertai dengan dokumen serta pertanggungjawaban. Pada tingkat desa di sampaikan kepada aparat desa dan BPD, sedangkan kepada masyarakat di sampaikan pada musrembangdus dan penggalian gagasan untuk tahun anggaran

berikutnya. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Kerirea dan aparat Desa Kerirea.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, sehubungan dengan Transparansi dalam tata kelola keuangan desa di Desa Kerirea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun anggaran 2016, maka disarankan:

1. Pemerintah desa harus memberikan informasi dalam perencanaan anggaran dan perencanaan pembangunan kepada masyarakat yang disosialisasikan menggunakan sarana papan informasi, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat informasi di desa.
2. Dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa harus memberikan informasi dalam pelaksanaan pembangunan disertai dengan administrasi pembiayaan kepada masyarakat serta ditempelnya papan pengumuman yang terkait dengan pembiayaan pelaksanaan proyek di setiap proyek pembangunan yang ada di desa. dan tetap pertahankan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan.
3. Dalam tahap penatausahaan masyarakat desa harus minta informasi pembiayaan serta aparat desa harus memberikan informasi pembiayaan kepada masyarakat.
4. Dalam tahap pelaporan pemerintah harus di laporkan pada setiap bulan dan pemerintah desa harus belajar dalam mengoperasikan komputer.
5. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa harus melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan disertai dokumen LPJ.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Adrianto Nico, 2007: *Good e-Government: Tansparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang : Bayumedia Publishing.

Annisaningrum. 2010: *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*.

Atmadja, Tungga Anantawikrama: 2013, *Manajemen Sektor Publik*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Bennis Waren, dkk, 2009: *Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*, Jakarta Libri.

Faisal Sanapiah, 2010: *Format – Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hermiono Agustinus, 2013: *Asesmen Kebutuhan Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Iskandar, 2009: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004: Jakarta : Balai Pustaka.

Moleong JLexi, 2010: *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rodakarya.

Minarti Sri, 2011: *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, jogjakarta: AR- Ruzz Media.

Mardiasmo, 2002: *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.

Randi R Wrihantolo : 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta : Elekx Media Komputindo.

Sugiyono; 2009: *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, 2013: *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia.

Sutedi Adrian, 2009: *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta; Sinar Grafika.

Sule Tisnawati, 2009: *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup.

Tahir Arifin, 2015: *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alvabeta.

Usman Nurdin, 2002: *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Undang - Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

PermenDesa Nomor 22 Tahun 2016

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang – undang Nomor 9 Tahun 1999

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008

Jurnal

Amarudin, dkk, 2012, dalam jurnal Ilmu Pemerintahan: *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan KalenaKabupaten Luwu Timur*, Universitas Muhammadiyah Makasar.

Faridah, 2015: *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Ejurnal Ilmu dan Riset Akuntansi vol. 4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.

Iqsan, Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2016: *Transparansi Pemerintah Desa Dalam*

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Universitas Mulawarman.

Pasanbu. FJ, 2011: *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksebilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Tesis, Medan, Program Pasca Serjana Universitas Sumatra Utara.

Werimon, dkk, 2007: *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Makassar.

Verra Zen Via, 2015, dalam Jurnal Ilmu Administrasi: *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumuknas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011- 2013)*, Fisip Universitas Jember.

Internet

[http://Seknafitra. PengertianTata Kelola Keuangan.Blogspot.Com](http://Seknafitra.PengertianTataKelolaKeuangan.Blogspot.Com), diakses tanggal 20 mei 2017

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

I. Penjelasan Umum

1. Penelitian ini semata - mata bertujuan ilmiah dalam kaitannya dengan tugas akhir
2. Hasil penelitian ini tidak dipublikasikan kepada khalayak atau pihak manapun
3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk memberikan jawaban secara tepat dan jujur demi kelancaran dan ketepatan analisis hasil penelitian.
4. Atas kesediaan bapak/ibu/saudar/i yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran peneliti menyampaikan terimakasih

II. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan/ Pekerjaan :

Pendidikan :

Alamat :

III. Daftar Pertanyaan

A. Perencanaan

1. Apakah bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai sosialisasi mulai dari muserenbang dusun dan musrenbang Desa?

2. Apakah bapa/ibu terlibat dalam pertemuan mulai dari dusun atau musyawarah desa?
3. Apakah bapak/ibu dengan mudah mendapatkan informasi hasil musyawarah di dusun atau desa?

B. Pelaksanaan

1. Apakah bapak/ibu mengetahui informasi kegiatan yang dilaksanakan di desa?
2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa?
3. Apakah bapak/ibu dengan mudah mendapat informasi mengenai administrasi dan pembelanjaan kegiatan?

C. Penatausahaan

1. Apakah bapak/ibu meminta informasi mengenai bukti pembiayaan kegiatan?
2. Apakah bapak/ibu dengan mudah mendapatkan informasi mengenai bukti pembiayaan kegiatan?
3. Apakah bapak/ibu meminta klarifikasi mengenai kesesuaian dokumen dengan pembiayaan?

D. Pelaporan

1. Apakah bapak/ibu mengetahui informasi mengenai laporan kegiatan yang diberikan pemerintah Desa?
2. Bagaimanakah bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai laporan kegiatan yang diberikan pemerintah desa?

E. Pertanggungjawaban

1. Apakah selama ini pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan?
2. Bagaimanakah bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai laporan kegiatan yang diberikan pemerintah desa?
3. Apakah bapak/ibu meminta penjelasan mengenai pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah Desa?

Catatan:

Pertanyaan yang dibuat diatas merupakan pertanyaan penuyntun yang akan berkembang saat penelitian.